

Polisi Belum Bisa Memastikan Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

JAKARTA (IM) - Polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran Gedung Cyber yang berada di Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/12).

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Andriansyah mengatakan, sampai saat ini proses penyelidikan dengan olah tempat kejadian perkara (TKP) masih terus dilakukan bersama pusat laboratorium forensik masih dilakukan.

"Terakhir hari kemarin masih melakukan pemeriksaan dan hasilnya (olah TKP) belum keluar," kata Aziz saat dikonfirmasi Senin (6/12).

Tim puslabfor masih memerlukan beberapa bukti lain untuk menentukan penyebab kebakaran gedung Cyber.

"Tentu kita belum bisa mengarahkan ini bagian dari kecelakaan, kelalaian, keal-

paan atau kesengajaan. Kita masih perlu pemeriksaan alat bukti yang lain. Teman-teman dari puslabfor masih beberapa hari untuk melakukan pengecekan," ucap Aziz.

Kebakaran di Gedung Cyber terjadi pada Kamis (2/12) sekitar pukul 12.35 WIB. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas damkar menurunkan 22 unit mobil saat proses pemadaman.

Api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit setelah kejadian. Setidaknya ada dua korban yang tewas dalam kebakaran Gedung Cyber. Keduanya yakni Seto Fachrudin (18) dan Redzuan Khdafi (17). Redzuan sebelumnya dinyatakan pingsan dalam kebakaran itu. Dia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. ● **lus**

Ditangkap, Lima Pemuda Bawa Sajam, Diduga Hendak Tawuran di Jakarta Selatan

JAKARTA (IM) - Polisi menangkap lima pemuda di Jakarta Selatan, Sabtu (4/12) malam, karena membawa senjata tajam. Mereka diduga hendak melakukan aksi tawuran.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Andriansyah mengatakan, lima pemuda itu ditangkap saat petugas gabungan dari Polri, TNI dan Satpol PP menggelar operasi Cipta Kondisi.

"Kemarin Sabtu, malam Minggu kami gelar patroli gabungan. Masih saja ada beberapa kelompok pemuda yang berkeliling membawa sajam (senjata tajam). Para pelaku ada lima orang," kata Aziz di Polres Jakarta Selatan, Senin (6/12).

Azis menjelaskan, operasi Cipta Kondisi digelar untuk mencegah keributan antar

kelompok di Jakarta Selatan. Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir sejumlah kelompok pemuda hingga geng motor kerap terlibat keributan. Tak sedikit dari keributan itu mengakibatkan korban luka dan bahkan meninggal dunia.

"Operasi Cipta Kondisi ini sasaran kepada potensi peristiwa adanya perkelahian. Kami cegah dengan melaksanakan upaya-upaya preventif hingga represif," ucap Aziz.

Saat ini operasi Cipta Kondisi akan terus dilakukan Polri, TNI dan Satpol PP guna mencegah terjadinya tawuran dan keributan antar pemuda di Jakarta Selatan.

"Kami tiga pilar memutuskan, kami perlu memberi situasi yang tenang di Jaksel. Maka kami melaksanakan operasi Cipta Kondisi," ujar Aziz. ● **lus**



RENCANA PENUTUPAN RUAS JALAN KOTA BANDUNG

Pengendara melintasi ruas jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/12). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestaes Bandung mewacanakan kembali menutup 10 titik ruas jalan raya di Kota Bandung pada saat Libur Natal dan Tahun baru guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada PPKM level 3 serentak se-Indonesia.

Polri Jadi Lembaga Paling Dipercaya, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran Polri atas kerja keras dan pengabdian selama ini.

Menurut Listyo, kerja keras dan pengabdian jajaran kepolisian lah yang telah membuat Polri memperoleh hasil 80,2 persen pada tingkat kepercayaan publik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

"Angka ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir," kata Listyo dalam keterangannya di akun Instagram @kepalakepolisian_ri, Senin (6/12). "Puji Syukur Alhamdulillah, kerja keras dan pengabdian seluruh personel selama ini berdampak positif bagi Organisasi Polri," katanya menambahkan.

Namun menurut Listyo, angka itu tak dapat diraih apabila tanpa dukungan penuh dari masyarakat dan stakeholder terkait. Menurut mantan Kabareskrim itu, pencapaian tersebut merupakan wujud nyata Polri selalu berusaha untuk berbenah lebih baik.

"Segala masukan positif menjadi motivasi kami untuk selalu meningkatkan kinerja dan masukan yang negatif menjadi bahan refleksi dan introspeksi kami ke depannya," ungkap Listyo.

Menurutnya, pencapaian dalam hasil survei itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi Polri. Selain itu, pihaknya akan terus mempertahankan bahkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi Polri.

"Demikian mewujudkan sosok Polri yang selama ini diinginkan oleh masyarakat," katanya.

Listyo pun menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila Polri dalam berbagai tindakan belum memenuhi harapan masyarakat. "Ini akan menjadi motivasi kami untuk selalu berkembang menjadi lebih baik lagi dari hari yang kemarin," ujarnya.

Lembaga survei Indikator mengungkapkan institusi Polri menggantikan KPK sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Hal itu nampak dari hasil survei Indikator pada 2.020 responden pada periode 2-6 November 2021.

"Polisi sekarang sudah menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik, bukan lagi KPK," sebut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam rilis survei virtual, Minggu (5/12).

Adapun sebanyak 64 persen responden menyatakan percaya pada Polri dan 16 persen menyatakan sangat percaya. ● **lus**



KERJA SAMA POLRI DENGAN KEPOLISIAN SELANDIA BARU

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (kiri) bersama Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Pol Amur Chandra (tengah) memberikan keterangan pers usai penandatanganan kerja sama penanggulangan kejahatan transnasional antara Polri dengan kepolisian Selandia Baru di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/12). Kerja sama penanggulangan kejahatan transnasional tersebut meliputi terorisme, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan senjata api, perdagangan manusia, kejahatan keuangan dan ekonomi serta kejahatan siber.

Muncul #PercumaLaporPolisi dan #SatuHariSatuOknum, Ini Kata Polisi

Mabes Polri mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hingga kini terus memantau kinerja Polri dengan menyampaikan kritik dan masukan.

JAKARTA (IM) - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan pihaknya tetap menerima apapun masukan

dari masyarakat atas kinerja polisi selama ini. Terlebih, apabila masukan tersebut berupa kritikan atas kinerja polisi

yang dalam beberapa waktu belakangan kerap tersandung persoalan pidana.

"Semua saran masukan dan kritik dari seluruh masyarakat itu bagian dari evaluasi yang terus akan kita lakukan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/12).

Pernyataan ini disampaikan Dedi untuk menanggapi

banyaknya tagar di media sosial Twitter yaitu #percumalaporpolisi dan #satuharisatuoknum. Tagar itu diketahui mengemuka kembali setelah munculnya kasus Bripda RB yang diduga meminta seorang mahasiswa berinisial NWR untuk menggugurkan kandungannya setelah sebelumnya dihamili.

NWR diketahui meninggal dunia setelah bunuh diri di samping makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Menyikapi hal tersebut, Dedi menegaskan Polri tetap bertindak sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Arahan Bapak Kapolri saat apel kasatwil untuk pimpinan Polri di wilayah tidak boleh ragu-ragu melakukan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bersalah dan juga harus seimbang," tegasnya.

Sementara itu, anggota polisi yang memberikan prestasi harus dihadiah dengan reward atau apresiasi.

"Artinya keseimbangan antara punishment dan reward harus dilakukan mulai dari jajaran tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri. Itu komitmen kami," tutur Dedi.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hingga kini terus memantau kinerja Polri

dengan menyampaikan kritik dan masukan. Menurutnya, kritikan dan masukan dapat berguna bagi Polri sebagai instansi pemerintah untuk bekerja melaksanakan tugas secara profesional.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang menginginkan Polri menjadi organisasi yang baik yang dicintai masyarakat," ujar Dedi.

Dedi Prasetyo sebelumnya mengungkapkan bahwa Bripda RB sudah diberhentikan secara tidak hormat. Adapun RB adalah anggota Polri yang terseret kasus bunuh diri NWR, mahasiswa yang ditemukan meninggal dunia di samping makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur.

"Tindak tegas baik sidang kode etik untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," kata Dedi.

Tidak hanya itu, kata Dedi, Bripda RB juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang tidak akan tebang pilih dalam menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Terlebih pelanggaran berat seperti tindak pidana. ● **lus**

Kasus Aborsi Novia Widyasari, Polri Bantah Pernah Tolak Laporan Terhadap Bripda Randy

JAKARTA (IM) - Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menegaskan, Polri tidak pernah menolak laporan dari Novia Widyasari terhadap Bripda Randy Bagus terkait kasus dugaan aborsi yang berujung pada korban bunuh diri.

"Tidak ada laporan atau pengaduan ke Propam, baik di Polres maupun di Polda," kata Ahmad Ramadhan saat di konfirmasi, Jakarta, Senin (6/12).

Ramadhan menyebut, terkait perkara yang viral di media sosial hingga saat ini, setelah adanya penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

"Justru Polri yang aktif menelusuri kasus tersebut dan dengan cepat dan tegas memberikan tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran," ujar Ramadhan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bripda Randy ditahan lantaran diduga melanggar sanksi hukuman etik dan pidana. Dia juga terancam diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari satuan kepolisian.

Kematian Novia menjadi sorotan publik. Ia meninggal dunia dengan cara menenggak racun di samping makam ayahnya di Mojokerto, Jawa

Timur, lantaran dipicu kisah asmara. Diketahui sebelum bunuh diri, Novia dipaksa untuk menggugurkan janinnya dua kali, oleh kekasihnya yaitu Bripda Randy yang saat itu betugas di Polres Pasuruan.

Sebagai informasi, saat ini Bripda Randy Bagus Sasongko, mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jatim. Penahanan Bripda Randy dilakukan guna mempercepat penyelidikan kasus yang mengerjannya.

Selain untuk mempercepat proses penyelidikan, penahanan ini juga dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Bripda Randy akan ditahan selama setidaknya 20 hari.

"Kami lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Minggu (5/12).

Bripda Randy ditahan lantaran diduga melanggar sanksi hukuman etik dan pidana. Dia juga terancam diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari satuan kepolisian.

Menurut Wakapolda Jatim, Brigjen Slamet Hadi Suprptojo, Bripda Randy diperiksa segera setelah kasus Novia Widyasari men-

jadi viral. Penyelidikan yang dilakukan tim gabungan Polres Mojokerto dan Ditreskrim Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Randy dan Novia berkenalan di suatu acara pembukaan toko distro di Malang pada Oktober 2019. Selanjutnya mereka bertukar nomor handphone dan berpacaran.

"Saat pacaran mereka telah melakukan hubungan layaknya seperti suami-istri di berbagai kost mereka di Malang dan hotel," ungkap Wakapolda saat jumpa pers di Polres Mojokerto, Sabtu (4/12) malam.

Hubungan itu menyebabkan Novia hamil sebanyak dua kali. Selanjutnya pada Maret 2021 dan Agustus 2021. Dalam dua kesempatan itu Bripda Randy menaruh Novia menggugurkan kandungan dengan obat khusus.

Atas perbuatannya, Bripda Randy langsung ditahan dan dijerat dengan Pasal 348 KUHP juncto pasal 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin dengan ancaman lima tahun penjara. Kepolisian juga akan melakukan proses pidana sidang kode etik terhadap Bripda Randy yang terancam sanksi pemecatan. ● **lus**



EVAKUASI KORBAN ERUPSI GUNUNG SEMERU

Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban yang tertimbun material gurguran awan panas Gunung Semeru saat operasi pencarian korban di Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur, Senin (6/12). Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal hingga pukul 11.10 WIB Senin kemarin berjumlah 15 orang dan 27 orang masih dalam proses pencarian.

Polri Pastikan Proses Rekrutmen Eks Pegawai KPK Jadi ASN Berjalan Cepat

JAKARTA (IM) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan, proses rekrutmen eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparat sipil negara (ASN) Polri akan berjalan cepat. Hanya saja Dedi belum dapat memastikan kapan para eks pegawai KPK itu resmi menjadi ASN Polri.

"Secepatnya, proses itu secepatnya. Perintah bapak Kapolri untuk segera diproses karena sudah ada peraturan kepolisiannya dan sudah ada surat persetujuan dari Kementerian PAN RB," kata Dedi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/12).

Dedi menjelaskan, untuk dapat menjadi ASN ada sejumlah tahapan yang harus dilalui para eks pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan KPK. Pertama, mengikuti sosialisasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 tentang pengangkatan khusus 57 mantan pegawai KPK dan penandatanganan kesediaan menjadi ASN Polri.

Setelah itu, 56 orang itu bakal mengikuti tahapan uji kompetensi yang bersifat pemetaan atau mapping. Dedi menegaskan, tidak akan ada hasil memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat di dalam tes tersebut.

"Ini hanya mapping, jadi tidak ada hasilnya adalah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat tidak ada, hanya mapping sesuai kompetensi baru nanti ditempatkan sesuai dengan ruang jabatan yang sudah disediakan berdasarkan keputusan kementerian PAN RB," jelasnya.

Kemudian, setelah ujian

itu, para eks pegawai KPK akan diberikan nomor induk kepegawaian Polri. Nomor itu akan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Itu semua prosesnya akan secepatnya akan diproses. Apabila sudah clear, nanti akan kita sampaikan updatenya kepada seluruh rekan-rekan," ucap Dedi.

Setelah menerima nomor induk, para eks pegawai KPK akan resmi dilantik sebagai ASN Polri. Sebelumnya diberitakan, Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah menerima sebanyak 52 orang eks pegawai KPK di Mabes Polri, Jakarta pada Senin (6/12) pagi. Ia mengatakan, kehadiran 52 orang tersebut atas undangan Polri terkait sosialisasi menjadi ASN di lingkungan Polri.

"Dari 52, 52 hadir, dari undangan yang sudah disampaikan pada 57 rekan-rekan eks pegawai KPK, hadir 52," kata Dedi.

Dia menjelaskan, terdapat lima orang yang tidak dapat hadir pada Senin di Mabes. Menurut Dedi, pihaknya akan terus mengkonfirmasi kepada Riswin untuk kehadiran di Mabes pada hari selanjutnya.

"Nanti akan kita coba konfirmasi kembali," ucap Dedi.

Kedua, atas nama Nanang yang tak bisa hadir lantaran meninggal dunia. Ketiga, satu orang sedang berada di Makassar atas nama Faisal.

"Kemudian satu lagi sedang menyelesaikan studi tesisnya S2nya, atas nama saudara Novariza. Kemudian satu keterangan menginformasikan bahwa persiapan nikah saudara Ita," tutur Dedi. ● **lus**